

BUKU INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

by Tim Penulis

Submission date: 01-Jul-2021 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1614491291

File name: Book_Chapter_Imelda_Bab_1.pdf (1.34M)

Word count: 8385

Character count: 52933

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis



**INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH :
TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Tim Penulis

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2021
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting cover: Anggita Feisabella Rizanti
Setting & Lay Out Isi : Devi
Cetakan Pertama, Januari 2021
xiv + 252 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-913-8

KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, dan karunia-Nya penyusunan buku yang berjudul “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” dapat terselesaikan. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menyambut dengan baik dan penuh rasa syukur atas terbitnya buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.

Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya secara ringkas meliputi konsep dan defenisi dasar, formulasi dan contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris yaitu lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri, efisiensi perbankan, perkembangan inklusi keuangan, struktur ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I Analisis Ekonomi Daerah	
Imelda, M. Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti.....	1
BAB II Analisis Keuangan Daerah	
Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini	43
BAB III Lingkungan dan Pembangunan	
Abdul Bashir, Mukhlis, Bambang Bemby Soebyakto, Ichsan Hamidi	79
BAB IV Upah Pekerja: Determinan dan Struktur	
Yunisvita	103
BAB V Aglomerasi Industri: Telaah Prospek Untuk Industri Kecil di Sumatera Selatan	
Mukhlis, Bernadette Robiani, Dirta Pratama Atiyatna, Hamira	151
BAB VI Efisiensi Perbankan	
Suhel	181
BAB VII Perkembangan Inklusi Keuangan Sumatera Selatan	
Sri Andaiyani dan Ariodillah Hidayat	217
BAB VIII Dana Desa: Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Wilayah	
Sukanto, Azwardi, Wika Indriyani	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019....	7
Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang	11
Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB Kota Bandar Lampung	16
Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) tahun 2015-2019	18
Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral terhadap PDB	19
Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	28
Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	29
Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	30
Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu Wilayah	31
Tabel 2.1 Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	50
Tabel 2.2 Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019	55
Tabel 2.3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk Provinsi Se-Sumbagsel	56

Tabel 2.4 Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APDB dan Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	60
Tabel 2.6 Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah	62
Tabel 2.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 2.8 Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	65
Tabel 2.9 Penghitungan Share PAD Provinsi Lampung Tahun 2019	66
Tabel 2.10 Penghitungan Growth PAD Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 (Rupiah)	66
Tabel 2.11 Perbandingan rata-rata <i>share</i> PAD dan <i>Growth</i> PAD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	67
Tabel 2.12 Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah	70
Tabel 2.13 Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	70
Tabel 2.14 Klasifikasi Rasio Efektifitas	72
Tabel 2.15 Klasifikasi Rasio Efisiensi	73

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	73
Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 (Rupiah)	74
Tabel 2.18 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah) ..	75
Tabel 5.1 Indikator Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	171
Tabel 7.1 Hasil Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan di Sumatera Selatan	223
Tabel 8.1 Perkembangan Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2015 dan 2020	243
Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera 2018 dan 2020	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	45
Gambar 2.2 Tipologi Kinerja APBD	57
Gambar 2.3 Tipologi Kinerja APBD Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019	58
Gambar 2.4 Kriteria Share and Growth	65
Gambar 2.5 Analisa Kriteria Share and Growth Provinsi Lampung Tahun 2018-2019	68
Gambar 3.1 Hubungan antara Degradasi Lingkungan dan Pembangunan	87
Gambar 3.2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	91
Gambar 4.1 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan tingkat Pendidikan Pekerja	141
Gambar 4.2 Upah Rata-rata per Jam berdasarkan Gender Pekerja ..	142
Gambar 4.3 Rata-rata Upah Laki-laki Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 4.4 Rata-rata Upah Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama	143
Gambar 5.1 Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia	152
Gambar 5.2 Pangsa IK terhadap PDB Harga Berlaku Indonesia, 2019	152
Gambar 5.3 Pangsa IK terhadap PDB Harga Konstan Indonesia 2019	152
Gambar 5.4 Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di Sumatera Selatan, 2009-2019	153

Gambar 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan 2009-2019	154
Gambar 5.6 Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	163
Gambar 5.7 Sistem Pengupahan pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.8 Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	165
Gambar 5.9 Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	167
Gambar 6.1 Efisiensi Teknik dan Efisiensi Alokatif	184
Gambar 6.2 Kerangka Konseptual Efisiensi Perbankan	187
Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (Persen)	230
Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)	231
Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	240
Gambar 8.4 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan di kabupaten Muara Enim	241

BAB I

ANALISIS EKONOMI DAERAH

Oleh:

Imelda, Deassy Apriani, Anggita Feisabella Rizanti, Mega Debiyanti

1.1 Konsep dan Definisi Ekonomi Wilayah

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi dan regional serta mempercepat pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Dengan demikian, pembangunan ekonomi mengupayakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang lebih baik pula.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat tersebut, maka statistik pendapatan nasional/regional dapat digunakan. Angka-angka pada pendapatan nasional/regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pihak swasta dan juga dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk perencanaan sekaligus evaluasi di bidang ekonomi sesuai dengan batas wilayah administrasi pemerintahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam satu periode tertentu. PDRB yaitu nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat diartikan juga sebagai nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh elemen ekonomi.

Selain itu, perhitungan PDRB bermanfaat untuk berbagai kebutuhan penghitungan dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2008) antara lain:

1. Sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
2. Mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah yang biasa diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan perkapita.
3. Mengetahui struktur perekonomian dan perubahannya, pendapatan regional biasanya ditunjukkan menurut sektor. Apabila pendapatan regional diakumulasikan dari waktu ke waktu maka akan terlihat perubahan kontribusi dari masing-masing sektor serta perubahan struktur ekonominya.
4. Mengetahui produktivitas per sektoral, apabila data tenaga kerja disajikan secara sektoral maka produktivitas per sektor dapat diketahui besarannya. Produktivitas tenaga kerja sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.
5. Mengukur elastisitas kesempatan kerja dengan bantuan employment data, apabila data pendapatan regional dan data

employment disajikan berdampingan secara runtut waktu, maka dapat dihitung angka elastisitas kesempatan kerja terhadap pendapatan regional. Angka elastisitas kesempatan kerja mencerminkan pengaruh kenaikan dan penurunan pendapatan regional terhadap kesempatan kerja.

Selain manfaat ada juga keterbatasan yang dihadapi dalam penghitungan PDRB sebagai indikator ekonomi makro. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) ada beberapa keterbatasan dalam penghitungan PDRB, yaitu:

1. Jasa yang tidak dapat dinilai.

Jasa ini misalnya jasa seorang anak dalam membantu orang tuanya, jasa pelayanan seorang teman ke teman lainnya dan jasa lain yang dilakukan tanpa perhitungan materi.

2. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ilegal

Kegiatan ini misalnya penyelundupan, prostitusi dan kegiatan lainnya yang secara hukum negara maupun adat tidak boleh dilakukan.

3. Konsep pembelian oleh rumah tangga terhadap barang-barang yang sifatnya tahan lama.

Ada beberapa barang tahan lama yang dibeli oleh rumah tangga yang tidak habis dipakai dalam satu periode tertentu, contohnya mobil, dan perabot lainnya. Tetapi dalam konsep neraca ekonomi pembelian barang-barang semacam ini khusus oleh rumah tangga dan dianggap sebagai barang konsumsi bukan barang modal.

4. Konsep pengeluaran untuk pendidikan.

Jika konsep pengeluaran dikaitkan dengan konsep pembentukan modal maka konsep pengeluaran pendidikan akan dimasukkan ke dalam pembentukan modal. Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk pendidikan umumnya akan dinikmati atau akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dalam neraca ekonomi, pengeluaran untuk pendidikan dimasukkan ke dalam biaya atau *current cost*.

5. Anggapan tabungan sama dengan investasi.

Teori pendapatan dan regional memiliki anggapan bahwa pendapatan akan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah tabungan akan sama dengan investasi periode yang sama. Tapi pada kenyataannya dalam satu tahun, jumlah pendapatan tidak sama dengan konsumsi ditambah investasi. Hal ini dikarenakan konsumsi pada akhir tahun berasal dari pendapatan tahun sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga konstan dan maupun harga berlaku. PDRB Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasarnya. Sedangkan PDRB Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Penghitungan PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil (nyata) dari tahun ke tahun, pada penghitungan harga konstan faktor perubahan harga tidak ada. Sedangkan PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi. Secara lebih rinci dapat dijelaskan dengan formulasi sebagai berikut:

1. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau seluruh sektor dari tahun ke tahun. faktor perubahan harga tidak ada.

$$PDRB = \sum_i^n \bar{P}_i Q_i$$

Dimana \bar{P}_i adalah harga yang dipakai untuk perhitungan tahun dasar.

2. PDRB harga berlaku menggambarkan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun itu. Jika nilai PDRB tinggi, maka hal ini mengindikasikan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

$$PDRB = \sum_i^n P_i Q_i$$

Dimana P_i adalah harga yang digunakan untuk perhitungan harga berlaku saat output diproduksi atau tahun berjalan. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDB/PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan hasil yang sama antara hasil jumlah pengeluaran dengan hasil jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama jumlah dengan pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Indonesia menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi/kabupaten/kota dalam periode tertentu. Unit produksi dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Rumus perhitungan pendekatan produksi, yaitu:

$$\text{Output } b,t = \text{Produksi } t \times \text{Harga } t$$

$$\text{NTBb},t = \text{Output } b,t - \text{Biaya Antara } b,t$$

Atau

$$\text{NTBb},t = \text{Output } b,t - \text{Rasio BTBo}$$

Keterangan :

Output b,t : Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTBb, t : Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun ke y

Produksi t : Kuantum produksi tahun ke t

Harga t : Harga produksi tahun ke t

Rasio NTB : Perbandingan NTB terhadap Output (NTB/Output)

Rasio NTBo : Rasio NTB pada tahun dasar (o)

Tabel 1.1 Contoh PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)					
	Harga Konstan 2010			Harga Berlaku		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,258,376	1,307,374	1,354,957	1,787,963	1,900,804	2,013,627
B. Pertambangan dan Penggalian	779,678	796,505	806,206	1,029,555	1,198,987	1,149,914
C. Industri Pengolahan	2,103,466	2,193,368	2,276,683	2,739,712	2,947,451	3,119,617
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101,551	107,109	111,437	162,340	176,640	185,115
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,985	8,430	9,006	9,439	10,024	10,736
F. Konstruksi	987,925	1,048,083	1,108,425	1,410,514	1,562,297	1,701,741
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,311,747	1,376,883	1,440,523	1,768,865	1,931,819	2,060,773
H. Transportasi dan Pergudangan	406,679	435,382	463,255	735,230	797,847	881,663
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298,130	315,069	333,358	387,013	412,710	440,268
J. Informasi dan Komunikasi	503,421	538,763	589,435	513,716	558,938	626,425
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	398,971	415,621	443,042	571,204	616,315	671,356
L. Real Estate	289,569	299,648	316,837	382,259	406,014	439,367
M. N. Jasa Perusahaan	172,764	187,691	206,936	238,217	267,094	304,286
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326,514	349,375	365,678	499,344	542,029	572,457
P. Jasa Pendidikan	304,811	321,132	341,329	447,138	481,724	522,746
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,498	117,326	127,507	144,831	158,064	174,802
R,S,T,U. Jasa lainnya	170,175	185,432	204,999	239,259	268,626	308,840
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	9,531,259	10,003,188	10,499,612	13,066,596	14,237,382	15,183,730
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	381,669	422,209	449,632	523,230	600,930	523,230
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9,912,928	10,425,397	10,949,244	13,589,826	14,838,312	15,706,960

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang juga ikut dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yaitu sewa tanah, gaji dan upah, bunga modal dan keuntungan yang sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Rumus perhitungan pendekatan pendapatan yaitu:

$$\text{PDRB} = \text{Sewa} + \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Laba}.$$

Misalnya, pada PDB Indonesia atas harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 13,589,826 milyar rupiah, artinya nya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 13,589,826 milyar rupiah.

PDRB yaitu semua komponen pengeluaran akhir antara lain: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta nirlaba; 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT; 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; 4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; 5. Perubahan Inventor; 6. Ekspor Barang dan Jasa; dan 7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa. PDRB didapat dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Rumus perhitungan pendekatan pengeluaran, yaitu :

$$\text{PDRB} = C + \text{Investasi} + \text{Pengeluaran Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor}).$$

Tabel 1.2 Contoh PDB Indonesia Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2007-2019

PDB Penggunaan (Seri 2010)	[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)			[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)		
	2,017	2,018	2,019	2,017	2,018	2,019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,126,308	5,651,454	5,936,400	7,623,056	8,274,212	8,965,837
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	105,362	122,917	135,974	160,594	180,815	206,013
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	774,305	828,683	855,597	1,239,470	1,336,613	1,385,882
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,041,585	3,443,242	3,596,364	4,370,575	4,789,385	5,119,491
5. Perubahan Inventori	133,400	197,370	129,954	210,636	338,634	226,923
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,971,183	2,287,090	2,267,120	2,742,061	3,111,923	2,914,636
a. Barang	1,752,865	2,038,154	2,018,128	2,386,700	2,708,683	2,500,984
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,818,133	2,198,263	2,029,280	2,606,283	3,268,839	2,991,963
Diskrepansi Statistik	100,604	92,905	57,116	-150,283	75,569	7,126
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9,434,613	10,425,397	10,949,244	13,589,826	14,838,312	15,833,943

Sumber: Badan Pusat Statistik

1.2 Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pengukuran tingkat kemakmuran ekonomi daerah yang sering juga disebut dengan tingkat kemakmuran kasar karena hanya memuat aspek ekonomi saja. Aspek kemakmuran lainnya menyangkut bidang sosial belum termasuk di dalamnya. Namun penggunaan pendapatan perkapita sebagai gambaran tingkat kemakmuran ekonomi lazim dipakai sebagai ukuran kemakmuran masyarakat baik di daerah maupun nasional (Sjafrizal, 2014). Dengan demikian, pendapatan perkapita merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan per kapita tersebut didapatkan dengan cara membagi pendapatan regional/produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rumus menghitung PDRB per kapita (Rp/Kapita), yaitu:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$$

Semakin tinggi PDRB/kapita semakin tinggi tingkat dan maju tingkat perekonomian suatu wilayah. Kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan dari hasil PDRB saja, namun juga tergantung banyaknya jumlah penduduk, penduduk yang banyak dapat memperkecil pendapatan per kapita. PDRB/Kapita diukur dengan Rp/Kapita, namun juga dapat dinyatakan dengan dolar AS untuk membandingkan posisi regional terhadap pendapatan negara lain dalam skala global. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita dalam 4 kategori, yaitu (Kuncoro, 2004):

1. *Low Income* (negara berpenghasilan rendah) adalah kelompok negara dengan pendapatan per kapita kurang atau sama dengan US\$ 1.035;
2. *Lower Middle Income* (negara berpenghasilan menengah) yaitu kelompok negara dengan pendapatan per kapita antara US\$1.036 – US\$ 4.045;
3. *Upper Middle Income* (negara berpenghasilan menengah atas) dengan pendapatan per kapita antara US\$ 4.046 – US\$ 12.535; dan

4. *High Income* (negara berpenghasilan tinggi) yaitu kelompok negara dengan pendapatan per kapita lebih dari US\$ 12.535.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan PDRB Kota Palembang

Kota Palembang	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1,602,071	1,623,099	1,651,857
PDRB Kota Palembang (Juta Rp)	87,073,353.9	92,476,406.6	98,661,068.9

Sumber : Badan Pusat Statistik

Contoh Menghitung Pendapatan Perkapita:

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2016 = \frac{87,073,353.9}{1,602,071}$$

$$= 54,350,496.26$$

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2017 = \frac{92,476,406.6}{1,623,099}$$

$$= 56,975,210.14$$

$$PDRB \text{ perkapita tahun } 2018 = \frac{98,661,068.9}{1,651,857}$$

$$= 59,727,366.78$$

Berdasarkan hasil hitung di atas dapat dikatakan bahwa Kota Palembang masuk dalam *Upper Middle Income* dengan pendapatan per kapita rata-rata US\$ 4.046 – US\$ 12,535.

1.3 Produktivitas Sektoral

Produktivitas sektoral adalah pembagian antar PDRB sektor tertentu dengan penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas wilayah menurut sektor menjadi ukuran yang penting dalam

membandingkan kemampuan masing-masing sektor dalam memberikan kesejahteraan perekonomian untuk pekerja sektor tersebut.

Rumus dalam menghitung produktivitas sektoral, yaitu:

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = \text{PDRB}_{si} / \text{JP}_{si}$$

Keterangan:

PDRB_{si} = Produk Domestik Regional Bruto Sektor (i)

JP_{si} = Jumlah tenaga kerja sektor (i), 9 sektor produksi

Contoh Menghitung Produktivitas Sektoral:

Jumlah tenaga kerja Kepulauan Riau tahun 2017 sebesar 78,782 dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian sebesar 5,945,614.56

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = \text{PDRB}_{si} / \text{JP}_{si}$$

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = 5,945,614.56 / 78,782$$

$$\text{Produktivitas Sektor (i)} = 75.46$$

Produktivitas sektoral memperlihatkan nilai Rp yang diterima penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas sektoral dengan pendapatan per kapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi produktivitas suatu sektor, maka semakin besar perannya bagi pembangunan.

1.4 Struktur dan Transformasi Ekonomi Wilayah

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka diperlukan analisa tentang struktur ekonomi daerah. Hal ini menjadi penting

untuk menentukan arah pembangunan daerah. jika struktur perekonomian suatu daerah didominasi oleh kegiatan pertanian atau agraris, maka arah pembangunan akan disesuaikan dengan struktur perekonomian tersebut. Sebaliknya, jika struktur perekonomian suatu daerah sudah mulai didominasi oleh sektor industri dan jasa maka kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan pada sektor tersebut.

Analisa struktur ekonomi daerah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada perubahan struktur ekonomi daerah kajian. Perekonomian dapat dikatakan maju apabila kontribusi sektor industri sudah lebih tinggi dari sektor pertanian dan jasa. Hal ini dikarenakan sektor industri mencerminkan kegiatan ekonomi yang sudah maju dan menggunakan teknologi modern sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Struktur ekonomi dapat diukur secara sederhana yaitu dengan menghitung kontribusi dari masing-masing sektor dalam nilai PDRB daerah yang bersangkutan berdasarkan harga berlaku. Kontribusi sektoral PDRB dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Kontribusi sektor } i = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor } i}{\text{Jumlah Nilai PDRB}} \times 100\%$$

Angka kontribusi sektoral ini umumnya telah disediakan dalam publikasi Badan Pusat Statistik, sehingga dapat langsung digunakan. Apabila berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi sektor pertanian adalah yang paling tinggi atau dominan, ini berarti struktur ekonomi daerah tersebut bersifat agraris atau tradisional. Tetapi jika hasil perhitungan menunjukkan kontribusi sektor industri yang lebih

dominan maka daerah atau wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai daerah industri atau *modern*. Sektor industri yang dimaksud tidak hanya berasal dari industri pengolahan saja, tapi juga sektor pertambangan, listrik serta air minum.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa, berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Sektor primer, terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian;
2. Sektor sekunder, terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan; dan
3. Sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain (termasuk pemerintahan).

Transformasi struktur ekonomi bisa terjadi dikarenakan oleh sifat manusia dalam kegiatan ekonomi. Menurut hukum *Engels*, semakin tinggi pendapatan, maka semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan dalam membeli barang produksi industri menjadi semakin bertambah besar (Muta'Ali, 2015). Sebagai akibatnya, peranan sektor pertanian semakin kecil dibandingkan dengan sektor industri.

Manfaat dari analisis struktur dan transformasi ekonomi wilayah, yaitu:

1. Mengetahui peran perekonomian sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar;
2. Peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah;
3. Identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi;
4. Analisis proses dan tahap transformasi struktural; serta
5. Mampu menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah

a. Struktur perekonomian Regional (*Share Regional*)

Jika dalam wilayah Provinsi (i) dilakukan analisis mengenai peran masing-masing kabupaten baik secara keseluruhan maupun sektoral. Data struktur perekonomian menunjukkan peran suatu sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar termasuk peran masing-masing sektor dalam perekonomian wilayah. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten juga memperlihatkan tingkat pemerataan perekonomian wilayah. Struktur juga dapat menunjukkan distribusi suatu perekonomian wilayah terhadap wilayah lain atau terhadap wilayah yang lebih besar, sehingga pemerataan atau ketimpangan wilayah dapat diidentifikasi. Semakin besar presentasi PDRB pada suatu sektor atau wilayah, maka semakin besar perannya untuk pembangunan perekonomian.

$$\text{share PDB kabupaten } i_t = \frac{PDB_{it}}{\sum_{i=1}^N PDB_{it}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_i = PDB Kabupaten i

$\sum PDB_i$ = PDB Provinsi i

t = Tahun t

i = Kabupaten

(menggunakan PDRB Harga Berlaku)

**Tabel 1.4 PDRB Provinsi Lampung dan PDRB
Kota Bandar Lampung**

PDRB	2016	2017	2018
PDRB Prov. Lampung	209,793,728.29	220,626,096.76	232,207,677.93
PDRB Kota Bandar Lampung	32,859,032.5	34,921,075.6	37,089,488.8

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{32,859,032.5}{209,793,728.29} \times 100 \\ &= 15,662,542.81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{34,921,075.6}{220,626,096.76} \times 100 \\ &= 15,828,170.88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{share PDB kabupaten } i_t &= \frac{37,089,488.8}{232,207,677.93} \times 100 \\ &= 15,972,550.58 \end{aligned}$$

b. Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sectoral*)

Jika pada suatu daerah (i) dilakukan analisis tentang peran sektor dalam pembangunan wilayah. Analisis dominasi peran suatu sektor dalam perekonomian dapat menunjukkan basis perekonomian wilayah.

$$\text{share PDB sektor } i_t = \frac{PDB_{it}}{\sum_{i=1}^N PDB_{it}} \times 100$$

Keterangan:

PDB_i = PDB sektor i

$\sum PDB_i$ = Total PDB i

t = Tahun t

i = Sektor

(menggunakan PDRB Harga Berlaku, pada 17 sektor ekonomi)

Pengamatan pada struktur ekonomi dalam dua waktu yang berbeda dapat mengukur pergeseran peran sektor yang menunjukkan adanya proses transformasi struktural dari pertanian menuju sektor industri dan atau sektor jasa (Muta'Ali, 2015). Melalui kriteria Simon Kuznet dapat diketahui tahapan pembangunan.

Tabel 1.5 Contoh Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Harga Berlaku			TOTAL
	2019	2018	2017	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,72	12,81	13,16	38,69
B. Pertambangan dan Penggalian	7,26	8,08	7,58	22,92
C. Industri Pengolahan	19,7	19,86	20,16	59,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,19	1,19	3,55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,21
F. Konstruksi	10,75	10,53	10,38	31,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,01	13,02	13,02	39,05
H. Transportasi dan Pergudangan	5,57	5,38	5,41	16,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78	2,85	8,41
J. Informasi dan Komunikasi	3,96	3,77	3,78	7,55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24	4,15	4,2	12,59
L. Real Estate	2,77	2,74	2,81	8,32
M,N. Jasa Perusahaan	1,92	1,8	1,75	3,72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,62	3,65	3,67	3,67
P. Jasa Pendidikan	3,3	3,25	3,29	9,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,07	1,07	3,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,95	1,81	1,76	5,52
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100	100	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

**Tabel 1.6 Tahapan pembangunan dan Kontribusi Sektoral
Terhadap PDB**

Tahap Pembangunan	Peran Sektor terhadap PDB (%)		
	Pertanian	Indutri	Jasa
Awal	50-60	20-30	20
Akhir	10-20	40-50	40

Sumber: Simon Kuznet *Modern Economic Growth* Yale University Press, 1996

Dengan menggunakan kriteria UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) dapat diketahui peran sektor industri dapat digunakan untuk menilai tingkar industrialisasi, sebagai berikut:

1. PDB atau PDRB sektor industri < 10% merupakan kelompok negara atau wilayah non industri (*non industrial country*)
2. PDB atau PDRB sektor Industri 10-20% merupakan kelompok negara atau wilayah memasuki proses industrialisasi (*Industrializing country*)
3. PDB atau PDRB sektor industri 20-30%, yaitu negara atau wilayah tergolong semi industri (*Semi Industrializing country*)
4. PDB atau PDRB sektor industri >30% menunjukkan wilayah atau negara industri (*Industrial country*).

1.5 Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan aspek penting dalam proses

pembangunan daerah di samping aspek pemerataan dan stabilitas. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro dan Smith 2004). Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu berbagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB atau PDRB.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil atau tidak dihitung dengan kenaikan harga, baik dalam bentuk barang atau jasa dalam periode tertentu pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan harga dalam perhitungan maka data yang digunakan adalah PDRB harga konstan.

Manfaat dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi yaitu (Muta'Ali, 2015):

1. Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional;
3. Menyusun tipologi perkembangan perekonomian wilayah yaitu Tipologi Klassen;

4. Sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi sebagai dasar pembuatan
5. Sebagai perkiraan bisnis antar ke perekonomian wilayah
6. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

Terdapat tiga teknik perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu secara tahunan, rata-rata tiap tahun, dan *compounding factor*.

1. Cara Tahunan

Cara menentukan laju pertumbuhan ekonomi pada tahunan tertentu (misalnya tahun 2019 dan 2018), menggunakan rumus:

$$LPE_t = [(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$$

Keterangan:

LPE_t = Laju pertumbuhan ekonomi (%) tahun t

$PDRB_t$ = PDRB riil pada tahun t (Harga Konstan)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB riil pada tahun t-1 (Harga Konstan)

Contoh:

PDRB Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 98,661,068.9 milyar dan tahun 2017 Rp 92,476,406.6 milyar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dapat dihitung:

$$\begin{aligned} LPE_t &= [(98,661,068.9 - 92,476,406.6) / 92,476,406.6] \times 100\% \\ &= 6.68\% \end{aligned}$$

2. Cara Rata-rata tiap Tahun

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (misalnya antara tahun 2015 sampai dengan 2019) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \left[\left(\sqrt[n-1]{\frac{PDRB_{tn}}{PDRB_{to}}} - 1 \right) \right] \times 100\%$$

Keterangan:

r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n = Jumlah tahun (dihitung mulai awal dengan sampai dengan tahun akhir pengamatan)

PDRB_{tn} = PDRB tahun terakhir periode

PDRB_{to} = PDRB tahun awal periode

Contoh:

PDRB Aceh pada awal perencanaan (2010) memiliki PDRB Rp 101,545,236.83 milyar dan pada akhir perencanaan (2018) PDRB diprediksi meningkat menjadi Rp 126,824,491.42 milyar. Dengan waktu (n=9) dapat dihitung nilai pertumbuhan ekonomi (r):

$$r = \left(\sqrt[9]{\frac{126,824,491.42}{101,545,236.83}} \right) - 1$$

$$r = (\sqrt[9]{1,2489}) - 1$$

$$\begin{aligned} \text{Log } r &= (1/9 \log 1.2489 - 1) \\ &= (1/9 \times 0,0965) - 1 \\ &= 0.0107 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 r &= (\text{anti log } 0,0107) - 1 \\
 &= (1.9671513573e-20 - 1) \times 100\% \\
 &= 0.9675 \times 100\% \\
 r &= 96.75 \%
 \end{aligned}$$

3. *Compounding Factor*

$$PDRB_{tn} = PDRB_{to} (1 + r)^{n-1}$$

Keterangan:

- r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun
- n = Jumlah tahun (dihitung mulai awal dengan sampai dengan tahun akhir pengamatan)
- PDRB_{tn} = PDRB tahun terakhir periode
- PDRB_{to} = PDRB tahun awal periode

Sebagai contoh dengan menggunakan data tersebut maka nilai perhitungan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan *Compounding Factor* dapat dihitung:

Contoh:

PDRB Aceh pada awal perencanaan (2010) memiliki PDRB Rp 101,545,236.83 milyar dan pada akhir perencanaan (2018) PDRB diprediksi meningkat menjadi Rp. 126,824,491.42 milyar. Dengan waktu (n=9) dapat dihitung nilai pertumbuhan ekonomi (r):

$$(1 + r)^{n-1} = PDRB_{tn} / PDRB_{to}$$

$$(1 + r)^{9-1} = 101,545,236.83 / 126,824,491.42$$

$(1 + r)^8 = 0.80067$ berdasarkan tabel *compounding* didapat angka yang mendekati, pada tingkat pertumbuhan ekonomi 7.2%

1.6 Formulasi Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Sumber-sumber pertumbuhan didapat dari kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan potensi sumber dayanya. Semakin besar kuantitas dan semakin tinggi kualitas sumber daya tersebut, maka makin besar juga potensi wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengetahui sumber-sumber pertumbuhan wilayah menurut sektor ekonomi digunakannya analisis sumber pertumbuhan (*source of growth*). Formulasi yang digunakan dalam analisis *source of growth* yaitu:

$$Sog_i = Dpi \times LPE_i$$

Keteranga:

$$Dpi = Wi_{t-1} / \sum Wi_{(t-i)}$$

$$LPE_t = [(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}] \times 100\%$$

Keterangan:

SoGi = Sumber Pertumbuhan sektor ke-i

DPI = Distribusi persentase PDRB sektor ke-i

Pei = Pertumbuhan ekonomi sektor ke-i

Wi_{t-1} = Penimbangan sektor ke-I pada tahun ke (t-1) dan

Wi_(t-1) = 100

PDRB_{tn} = PDRB tahun terakhir periode

PDRB_{to} = PDRB tahun awal periode

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pertumbuhan bahan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin

cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro dan Smith 2004).

Contoh:

PDRB Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 98,66,068.9 milyar dan tahun 2017 Rp 92,476,406.6 milyar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dapat dihitung:

$$LPE_t = [(98,661,068.9 - 92,476,406.6) / 92,476,406.6] \times 100\% = 6.68\%$$

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Palembang memiliki PDRB tahun 2018 sebesar Rp 14,122,512.70 milyar dan tahun 2017 Rp 12,691,860.60 milyar sehingga laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dapat dihitung:

$$Dpi = Wi_{t-1} / \sum Wi_{(t-i)}$$

$$Dpi = 14,122,512.70 / 12,691,860.60$$

$$Dpi = 1.1127$$

$$Sogi = 1.1127 \times 6.68$$

$$Sogi = 7.52836$$

1.7 Laju Pertumbuhan Produktivitas Ekonomi

Laju pertumbuhan produktivitas ekonomi merupakan konsep yang membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk idealnya pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk sehingga masih terdapat surplus yang didapatkan untuk melakukan investasi dan pembangunan.

Tingkat kemajuan suatu wilayah secara real dapat ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan produktivitas ekonomi wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LPPK} = \text{LPE} - \text{LPP}$$

Keterangan

LPPK = Laju pertumbuhan produktivitas ekonomi (%)

LPE = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

LPP = Laju pertumbuhan penduduk (%)

Contoh:

Laju pertumbuhan PDRB Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 6.69% dan laju pertumbuhan penduduk tahun dengan periode 2018 1.42% maka laju produktivitas atau pendapatan per kapita tumbuh sebesar $6.69\% - 1.42\% = 5.27\%$.

Semakin besar nilai LPPK, maka semakin tinggi laju pertumbuhan produktivitas ekonomi wilayah. jika LPPK positif ($\text{LPE} > \text{LPP}$) maka perekonomian berkembang, sedangkan jika LPPK negatif ($\text{LPP} > \text{LPE}$) maka terjadi kemerosotan ekonomi wilayah. Berdasarkan hasil hitung di atas didapat kesimpulan bahwa laju Pertumbuhan Produktivitas ekonomi mengalami perkembangan sebesar 5.27%.

1.8 Analisis Tipologi Klassen

Prinsip analisis tipologi kelas digunakan untuk klasifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah dan klasifikasi sektor ekonomi.

1. Analisis Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Potensi Perkembangan Perekonomian Wilayah

Tipologi kelas digunakan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah dengan menggunakan basis data besaran pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi dengan pembagian berdasarkan rata-rata. Hasilnya berupa klasifikasi wilayah.

Manfaat dari analisis tipologi kelas yaitu:

1. Menentukan potensi perkembangan perekonomian wilayah
2. Menganalisis kinerja perekonomian wilayah
3. Menyusun klasifikasi tingkat perekonomian wilayah
4. Dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan wilayah
5. Menentukan prioritas wilayah pengembangan wilayah

Berdasarkan Tipologi Klassen, wilayah dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu:

1. *High growth and high income* (wilayah maju dan cepat tumbuh) adalah wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;
2. *High growth but high income* (wilayah maju tapi tertekan) adalah wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita lebih

tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;

3. *High growth but low income* (wilayah berkembang cepat) adalah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi; dan
4. *Low growth and low income* (Wilayah relatif tertinggal) adalah wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten atau kota di provinsi.

Formulasi tipologi klasen potensi perkembangan wilayah (misalnya dapat di kabupaten kabupaten dalam provinsi) sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Kriteria Tipologi Klasen Perkembangan
Ekonomi Wilayah**

Laju Petumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (<i>high growth and high income</i>)	Wilayah berkembang cepat (<i>high growth but low income</i>)
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan (<i>high growth but high income</i>)	Wilayah relatif tertinggal (<i>high growth and low income</i>)

Keterangan:

r_i = Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i

r = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi

Y_i = PDRB per kapita Kabupaten/Kota i

Y = PDRB per kapita Provinsi

(dapat juga digunakan untuk membandingkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kecamatan terhadap kabupaten atau provinsi terhadap nasional).

Tabel 1.8 Perhitungan Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita (Y)	laju Pertumbuhan Ekonomi	Y	R	Kwadrant
Ogan Komering Ulu	25.67	5	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ilir	23.39	5.01	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Muara Enim	61.82	8.67	$Y_i > Y$	$R_i > R$	I
Lahat	28.90	4.07	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Musi Rawas	32.29	5.79	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Musi Banyuasin	66.68	3.23	$Y_i > Y$	$R_i < R$	I
Banyuasin	22.44	5.14	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ulu Selatan	15.18	5.16	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Komering Ulu Timur	14.17	4.43	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Ogan Ilir	16.76	5.26	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Empat Lawang	13.54	4.28	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Pali	23.63	6.43	$Y_i < Y$	$R_i > R$	II
Musi Rawas Utara	28.03	4.22	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Palembang	59.73	6.69	$Y_i > Y$	$R_i > R$	I
Prabumulih	27.44	5.82	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Pagar Alam	15.66	4.98	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Lubuk Linggau	17.87	6.01	$Y_i < Y$	$R_i < R$	IV
Sumatera Selatan	35.58	6.04			

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

**Tabel 1.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan
Ekonomi Wilayah**

Laju Petumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	Yi>Y	Yi<Y
ri > r	Muara Enim Musi Banyuasin Palembang	Pali
ri < r	-	Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Lahat, Musi rawas, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

2. Analisis Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Produktivitas Sektor Ekonomi

Analisis tipologi kelas untuk klasifikasi produktivitas sektor ekonomi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui gambaran pola serta struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Hasil dari analisis ini digunakan dalam mengklasifikasikan laju pertumbuhan sektor ekonomi (17 lapangan usaha) berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu sektor yang cepat maju dan tumbuh cepat, sektor yang berkembang dengan cepat, sektor maju tetapi tertekan, dan sektor relatif tertinggal. Berikut manfaat analisis tipologi kelas untuk produktivitas sektor ekonomi:

1. Menyusun klasifikasi kinerja sektoral dalam perekonomian wilayah
2. Menentukan potensi perkembangan sektor ekonomi;
3. Menganalisis kinerja sektoral dalam suatu wilayah
4. Dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan wilayah
5. Menentukan prioritas sektor andalan pengembangan wilayah

Formulasi tipologi klassen untuk potensi sektor ekonomi wilayah (misalnya tipologi sektor kabupaten dalam provinsi) dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10 Kriteria Tipologi Klassen untuk Klasifikasi Kinerja Sektor I di suatu wilayah

Kontribusi (y) Pertumbuhan (r)	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih besar dari kontribusi provinsi ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi sektor i di kabupaten lebih kecil dari kontribusi provinsi ($y_{ik} < y_i$)
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih besar dari laju pertumbuhan provinsi ($r_{ik} > r_i$)	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Berkembang Cepat
Laju pertumbuhan sektor i di kabupaten lebih kecil dari laju pertumbuhan provinsi ($r_{ik} < r_i$)	Sektor Maju Tertekan	Sektor Relatif Tertinggal

Keterangan:

r_{ik} = Laju pertumbuhan sektor (i) di Kabupaten (k)

r_i = Laju pertumbuhan sektor (i) di tingkat Provinsi (atau dapat juga menggunakan tingkat nasional)

y_{ik} = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Kabupaten (k)

y_i = Kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Provinsi (atau dapat juga menggunakan tingkat nasional)

Laju pertumbuhan nilai produksi sektor i di kabupaten k (r_{ik}) dan tingkat provinsi atau nasional (r_i) serta kontribusi sektor terhadap total PDRB kabupaten k (y_{ik}) dan tingkat provinsi atau nasional dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$r_{ik} = \frac{P_{ikt} - P_{iko}}{P_{iko}} \times 100\% \qquad r_i = \frac{P_{it} - P_{io}}{P_{io}} \times 100\%$$

$$y_{ik} = \frac{P_{ik}}{P_{tk}} \times 100\% \qquad r_{ik} = \frac{P_i}{P_t} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{ikt} = Nilai produksi sektor i tingkat kabupaten pada tahun ke-t

P_{iko} = Nilai produksi sektor i tingkat kabupaten pada awal tahun

P_{it} = Nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional pada tahun ke-t

P_{io} = Nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional pada awal tahun

P_{ik} = Total nilai produksi sektor i tingkat kabupaten

P_{tk} = Total nilai produksi PDRB tingkat kabupaten

P_i = Total nilai produksi sektor i tingkat provinsi atau nasional

P_t = Total nilai produksi sektor PDRB tingkat provinsi atau nasional

Menurut tipologi klassen, klasifikasi produktivitas sektor ekonomi sektor perekonomian wilayah dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Sektor maju dan cepat tumbuh, merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan kontribusi yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;

2. Sektor maju tapi tertekan, merupakan sektor yang mempunyai kontribusi sektor lebih tinggi namun tingkat pertumbuhan ekonomi sektoralnya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi;
3. Sektor berkembang cepat, merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi namun konstitusi sektor lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi; dan
4. Sektor relatif tertinggal, merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral tinggi dan kontribusi sektor yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten atau kota di provinsi.

1.9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sering juga disebut koefisien modal. ICOR merupakan metode yang dikembangkan untuk menghubungkan faktor produksi atau pembentukan modal tetap PDRB dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan regional. Teori yang mendasari analisis ICOR yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar tentang *Capital Output Ratio (COR)* atau koefisien modal yang menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dengan nilai output. Dengan demikian, ICOR dapat didefinisikan sebagai hubungan antara investasi yang ditanamkan dan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari suatu investasi.

ICOR menjadi penting untuk menguji konsistensi antara target pertumbuhan dengan tambahan modal yang mungkin dapat

dikumpulkan dari investasi yang sedang berjalan (Widodo, 2006). Oleh karena itu, ICOR dapat digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Menurut Susanti, dkk (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi ICOR antara lain:

1. Komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi. Hal ini disebabkan karena tingkat penggunaan modal berbeda-beda menurut sektor tertentu dan faktor lain adalah masa tenggang produksi dari berbagai sektor;
2. Laju pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi
3. Tingkat pendapatan per kapita suatu negara. ICOR suatu negara cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi tujuan adalah bagaimana mengupayakan daerah dengan pendapatan per kapita rendah dapat menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tinggi. Konsep ICOR menyangkut dengan jenis teknologi produksi yang digunakan yang dapat dilihat dari tambahan penggunaan kapital yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output. Hal ini menunjukkan negara yang sedang berkembang dengan kegiatan utamanya didominasi oleh sektor pertanian yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada modal (*labor intensive*) akan cenderung memiliki nilai ICOR yang rendah. Sedangkan negara maju yang kegiatan ekonominya lebih didominasi oleh sektor industri dan

jasa menggunakan modal lebih besar (capital intensive) akan cenderung memiliki nilai ICOR yang lebih tinggi.

Rasio modal-output adalah hubungan antara besarnya stok modal dan output total (Asryad, 1999). Stok total (K) berkaitan langsung dengan kemampuan memproduksi output (Y) yang ditunjukkan oleh *capital output ratio* (COR) sama dengan K/Y , dalam bentuk perubahan. $ICOR = \Delta K/\Delta Y$ dikenal dengan rasio tambahan kapital output (ICOR).rumusnya:

$$ICOR = \Delta K_t/\Delta Y_t$$

Keterangan:

ΔK_t = Tambahan kapital (modal) atau investasi

ΔY_t = Perubahan output, yang ditunjukkan oleh perubahan PDRB atau pertumbuhan ekonomi

Contoh, investasi bruto Daerah ABC tahun 2018 sebesar 123.874.081,56 dengan tingkat perubahan output (PDRB) sebesar 9.912.928.10

$$ICOR = \Delta K_t/\Delta Y_t$$

$$ICOR = 123.874.081,56/9.912.928.10$$

$$ICOR = 12,49$$

Dalam menghitung jangka panjang selama n tahun maka ICOR rata-rata dihitung dengan rumus:

$$ICOR = \frac{\sum ICOR_t}{n}$$

Keterangan:

$\sum ICOR_t$ = Jumlah ICOR selama periode n

n = Jumlah tahun pengamatan

Dapat juga ditulis dalam bentuk operasional berikut:

$$ICOR = \frac{I}{PDB} \times 100\% \\ \Delta PDB (\%)$$

Keterangan:

$I/PDB \times 100\%$ = Persentase investasi terhadap PDB (%)

ΔPDB = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Umumnya target pertumbuhan ekonomi berada dalam batas tertentu, maka angka ICOR yang dianggap mempunyai produktivitas investasi yang baik yaitu di antara 3 hingga 4, hal ini dikarenakan jika ICOR semakin tinggi, maka semakin mahal penciptaan output pada wilayah tertentu. Dengan perkataan lain, jika ICOR semakin tinggi, maka modal (investasi) yang dibutuhkan akan semakin besar untuk mencapai tingkat pertambahan output wilayah atau pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan demikian, ICOR yang tinggi mengindikasikan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi.

Contoh:

Jika diketahui Daerah ABC memiliki investasi bruto (pembentukan modal bruto) terhadap PDRB suatu wilayah yaitu sebesar 12.49% dan nilai atau target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.07%, maka ICOR dapat dihitung yaitu:

$$ICOR = \frac{12.49}{5.07}$$

$$ICOR = 2.46$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pertambahan output daerah ABC sebesar 5.07 dibutuhkan tambahan kapital sebesar 2.46.

1.10 Analisis Kebutuhan Investasi

1. Kebutuhan Investasi

Investasi dalam ilmu ekonomi adalah pembelian atas barang-barang modal, persediaan atau inventori dan struktur usaha. Investasi menjadi komponen dalam perhitungan pendapatan daerah/wilayah. Investasi dibutuhkan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan proses produksi yang selanjutnya akan menambah output daerah/wilayah. Dengan demikian, investasi berperan penting karena besarnya investasi berdampak pada terciptanya output, sehingga pendapatan daerah/wilayah juga meningkat. Prasantiano (2005) mengemukakan bahwa penambahan investasi memiliki dampak lainnya yaitu konsumsi masyarakat meningkat, penerimaan pajak juga meningkat sehingga penerimaan pemerintah juga meningkat yang berakibat pada kemampuan belanja pemerintah juga meningkat.

Faktor utama yang menentukan besar kecilnya kebutuhan investasi setiap tahunnya adalah (Muta'Ali, 2015):

- (1) Rasio tambahan kapital dan output (ICOR) suatu sektor;
- (2) Target pertumbuhan sektor yang direncanakan; dan
- (3) Nilai tambah PDRB sektor tahun sebelumnya.

Dalam konsep ICOR diasumsikan bahwa (Y) adalah pendapatan domestik suatu wilayah dan (r) merupakan pertumbuhan pendapatan tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi yaitu (Arsyad 1999).

$$ICOR = \frac{I}{\Delta PDRB}$$

Maka

$$I_t = ICOR \cdot r \cdot PDRB$$

Keterangan:

ICOR = *Incremental Capital Output Ratio*

I = Jumlah investasi pada tahun-t

I_t = Jumlah investasi yang dibutuhkan

r = Tingkat pertumbuhan regional

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar tahun harga konstan tahun-t

$\Delta PDRB$ = Perubahan PDRB

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama, investasi yang dibutuhkan oleh suatu daerah yang memiliki nilai ICOR yang tinggi akan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki nilai ICOR yang lebih rendah, hal tersebut menggambarkan besarnya peranan nilai ICOR dalam menentukan jumlah investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian konsep ICOR menunjukkan bahwa besarnya laju pertumbuhan PDRB riil dan ICOR berbanding lurus dan mempengaruhi kebutuhan investasi secara sektoral maupun total. Oleh karena itu perencanaan investasi menjadi penting karena

terkait dengan target pencapaian pertumbuhan output baik secara sectoral maupun regional dan investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan asing.

Contoh:

ICOR wilayah yaitu 4.35 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4.6% serta PDRB mencapai 7,842 milyar, maka kebutuhan investasi:

$I_t = 4.35 \times 4.6 \times 7,842 = 156,918.42$ milyar. Jadi, dalam mencapai pertambahan output wilayah sebanyak 4.6% dibutuhkan tambahan kapital 156,918.42 milyar.

2. Formulasi *Propensity to Invest*

Propensity to Invest merupakan ukuran yang menyatakan besarnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah. Untuk menghitung *Propensity to Invest* dibutuhkannya data PDRB dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta perubahan stok atau investasi.

$$PI_t = \frac{I_t}{PDRB_t}$$

Keterangan:

PI_t = Propensity to invest tahun t

I_t = Investasi total (PMTB + Perubahan stok)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

3. Rasio Investasi Terhadap Tenaga Kerja

Semakin besar investasi yang ditanamkan di dalam sebuah perekonomian, maka peluang terbukanya kesempatan kerja semakin

tinggi. Oleh karena itu, penambahan investasi seharusnya diarahkan pada investasi padat karya, bukan hanya padat modal. Untuk menganalisis peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja yaitu:

$$PITK_t = \frac{I_t}{JTK_{it}}$$

Keterangan:

$PITK_t$ = Peran investasi dalam penyerapan tenaga kerja tahun t

I_t = Investasi total (PMTB + Perubahan stok)

JTK_{it} = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tahun t

Contoh, Investasi Daerah ABC tahun 2018 sebesar 123,874,081,564.256 dan Jumlah tenaga kerja Daerah ABC tahun 2018 sebesar 121.022.423

$$PITK_t = \frac{I_t}{JTK_{it}}$$

$$PITK_t = \frac{123,874,081,564.256}{121,022,423}$$

$$PITK_t = 1,023.563$$

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. R. (2005). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Graha Ilmu: Yogyakarta.*
- Arsyad, Licolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.*
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Buku I Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota. BPS. Jakarta.*
- Boediono, 1999:81, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.*
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Regional: Teori dan Praktik. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.*
- Muhyiddin, N. T. (2017). *Pembangunan Berkelanjutan Interaksi Desa-Kota Rural Urban Fringe. Unsri Press: Palembang.*
- Sukirno, Sadono. (2006) *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: Bima Grafika.*
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Rajawali Pers, Jakarta.*
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya Di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.*
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Rajawali Pers, Jakarta.*
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.*
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.*

BUKU INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH : TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

11%

★ pt.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%